



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## STRATEGI STABILITAS HARGA BERAS MELALUI EFEKTIVITAS DISTRIBUSI

**Ari Mulianta Ginting**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[ari.ginting@dpr.go.id](mailto:ari.ginting@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Hasil rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Februari 2023 menunjukkan bahwa inflasi nasional pada bulan Januari 2023 secara bulanan mengalami peningkatan hingga mencapai 5,28%. Salah satu komoditas penyumbang utama inflasi adalah beras. Padahal pemerintah telah melakukan impor beras untuk menambah pasokan beras dan menekan harga. Namun hasil rilis data BPS menunjukkan bahwa beras impor dinilai belum efektif meredam kenaikan harga beras di pasar. Hal ini dikarenakan distribusi beras impor ke kota-kota yang membutuhkan masih belum efektif dan masih tersendat.

Beras menjadi penyumbang inflasi beberapa bulan terakhir di Indonesia. Pasokan beras yang berkurang membuat harganya cenderung naik. Padahal, Pemerintah telah melakukan kebijakan pengendalian harga dengan cara melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton yang mulai direalisasikan sejak 16 Desember 2022. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog menjadi operator impor beras dan langsung melakukan distribusi ke 14 pelabuhan untuk mempercepat distribusi sehingga beras impor dapat tersalurkan ke wilayah terdekat. Namun, hasil jejaring distribusi yang menyambung dari pelabuhan kepada pedagang besar dan konsumen masih menjadi persoalan.

Perum Bulog tidak dapat langsung menyalurkan beras kepada pengecer, tetapi harus melewati kelompok-kelompok yang mengorganisasi pengecer. Pemangkasan rantai penjualan beras harus dapat segera dilakukan untuk memperpendek rantai distribusi beras yang telah diimpor untuk segera disalurkan kepada pengecer dan konsumen akhir. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menjelaskan melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 1/KS.02.02/K/1/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diharapkan dapat mempercepat distribusi beras.

Keputusan Kepala Bapanas tersebut menyatakan bahwa Perum Bulog dapat melaksanakan SPHP melalui operasi pasar secara langsung di tingkat eceran atau melalui distributor dan mitra yang ada di pasar tradisional atau modern. Keputusan ini mendorong pemerintah untuk segera menggandeng peritel dalam distribusi beras impor. Langkah ini bertujuan memberi alternatif beras medium nasional sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi dan menstabilkan harga beras di pasar. Namun, menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, penyaluran beras impor melalui ritel berpotensi tidak efektif mengendalikan harga apabila masih ada mata rantai distribusi yang terlibat. Pemerintah seharusnya dapat memfokuskan penyaluran beras impor ke pasar tradisional dan memastikan bahwa beras di beli oleh masyarakat, bukan pedagang atau spekulan.

Hal senada diungkapkan oleh Satuan Tugas atau Satgas Pangan, di tengah-tengah tingginya harga beras di tingkat konsumen. Praktik penyalahgunaan cadangan beras pemerintah atau CBP yang berasal dari impor berpotensi terjadi di tingkat pedagang. Berdasarkan hal tersebut

maka penyaluran beras impor Perum Bulog dari pelabuhan ke gudang, seperti Gudang *Food Station* dapat memengkas jalur distribusi. Pemotongan rantai distribusi beras menjadi salah satu opsi dalam meredam kenaikan harga beras di tingkat konsumen.

## Atensi DPR

Rilis data BPS menunjukkan bahwa kenaikan inflasi di Bulan Januari tahun 2023, salah satu komoditas yang menyumbang kenaikan tersebut adalah kenaikan harga beras. Kenaikan harga beras pada saat impor telah dilakukan menjadi anomali. Salah satu penyebab kenaikan harga beras di tingkat konsumen dikarenakan belum efektifnya distribusi beras impor ke daerah-daerah atau wilayah yang membutuhkan. Mengingat hal tersebut, Pemerintah bersama dengan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) harus dapat melakukan efektivitas distribusi beras impor. Oleh karenanya, DPR RI khususnya Komisi VI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong evaluasi terhadap distribusi beras impor. Komisi VI DPR RI juga harus dapat mendorong Perum Bulog untuk dapat memperpendek rantai distribusi beras impor langsung kepada pengecer untuk dapat meredam kenaikan dan stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

## Sumber

*Kompas*, 3, 4 & 6 Februari 2023;  
*Tempo*, 29 Januari 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd\_official

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyanti  
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Achmad Muchaddam F.  
Yulia Indahri  
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023